

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan, 2015).

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP-PNS) juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai pemberian Tambahan Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 yang dibuat pada tanggal 13 Maret 1980 yang berbunyi: “Pemerintah memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja serta untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya, maka dipandang perlu untuk memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai”. Pendekatan untuk memberikan kompensasi tunjangan tambahan penghasilan terhadap PNS diatas sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan PNS. Harapan kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah dengan diberlakukannya kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS daerah diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per- bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS termasuk pegawai pada garis depan pelayanan agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar prosedur baku (SOP) yang ditetapkan. Pemerintah di daerah dapat memberlakukan sanksi yang tegas bagi pegawai yang menerima suap dalam memberikan layanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. SAP dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah untuk kinerja pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor terdapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pada era globalisasi seperti sekarang ini, gaji tidak dapat dijadikan satu-satunya tumpuan untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Perlu adanya kompensasi lain selain gaji yaitu tambahan penghasilan atau insentif.





Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No 6 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan beban kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa dalam penambahan penghasilan pegawai, Bupati mempunyai aturan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tambahan penghasilan pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai diluar gaji berdasarkan pemerataan dan pembobotan masing-masing pegawai. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor ada dua yaitu TPP Pemerataan dan TPP Pembobotan. Laporan Harian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut LHKP adalah laporan harian yang wajib dibuat oleh pegawai berdasarkan uraian tugas yang melekat pada masing- masing jabatan. Aplikasi Laporan Harian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Aplikasi LHKP adalah aplikasi daring yang digunakan untuk membuat laporan harian kerja pegawai. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Online yang selanjutnya disebut SIAP Online adalah aplikasi daring yang digunakan untuk mengolah data dan menyediakan informasi kehadiran pegawai. Adapun Permasalahan TPP dengan menggunakan SIAP Online yaitu bergantung pada server dari diskominfo terhadap baik tidak nya jaringan dan jaringan juga selain memakai koneksi wifi atau sinyal biasa dapat mempengaruhi kecepatan dalam penginputan. Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor menurut data yang tersedia pada tabel 1.1 sampai 1.2 terdapat daftar TPP Pemerataan dan TPP Pembobotan bahwa pegawai negeri sipil sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mengalami peningkatan dalam hal kedisiplinan bisa dilihat pada gambar 2.1 sampai 2.6 yaitu absensi pegawai dan SKP yang merupakan rekapan kinerja dan kedisiplinan pegawai negeri sipil pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

Berlakunya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) ditindak lanjuti dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran berada didalam satu lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, saat ini menjadi Perangkat Daerah yang mandiri sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran. Terbentuknya suatu Dinas adanya susunan organisasi yang dimiliki dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hal ini yang mendasari penulis untuk menyusun laporan tugas akhir mengenai Analisis Tambahan Penghasilan Pegawai yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Atas informasi tersebut disusun tugas akhir yang berjudul **“Analisis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bogor.
2. Bagaimana proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
3. Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menggunakan sistem aplikasi komputer akuntansi yang terintegrasi.
4. Apakah penerapan akuntansi pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bogor telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan kebijakan dan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Bogor.
2. Menguraikan proses pencairan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
3. Menguraikan penginputan Tambahan Penghasilan Pegawai menggunakan sistem aplikasi komputer akuntansi terintegrasi.
4. Mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah berbasis aktual.

1.4 Manfaat Penulisan

Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi penulisan selanjutnya demi mengembangkan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan bidang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah Vokasi IPB

Penulisan ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan.

b. Bagi Instansi Pemerintah.

Sebagai masukan dan gambaran serta tambahan informasi agar memperhatikan pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ada di instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan dan pembaca dapat mengetahui informasi mengenai standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.

